BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Unit Analisis

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1

Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada 10 Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Kanwil Jawa barat 1. Maka pada sub bab ini akan menjelaskan sejarah pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama *"Cope Napoleon"*. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula

oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"*(Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Coorporative,* yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.

2. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" *(Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Menteri Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.01/1979 tanggal 6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman

No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Dalam perkembangan pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Jawa Barat 1 telah menjadi sepuluh KPP yakni :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 78
7. KPP Bandung Majalaya, Jalan Peta No. 7 Lingkar Selatan
8. KPP Madya, Jalan Asia Afrika No. 114
9. KPP Sumedang, Jalan Kiaracondong No.372

10. KPP Soreang, Jalan Cimareme No. 205 Ngamprah Kab Bandung Barat

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kanwil Jawa Barat 1 yaitu:

1. Visi

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

   a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa

   b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

   c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yangmenunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undangundang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

   d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*

4.1.2 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui dan memberikan batasan wewenang setiap bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari suatu organisasi. Sehingga

masing-masing bagian memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dijalankan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006, struktur orgasisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama,
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi;
4. Seksi Pengolah Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.3 Job Description

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Kantor Pelayanan Pajak Jawa Barat yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar 1 Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan penyuluhan (pembinaan terhadap karyawan yang ada di dalam wewenang kekuasaannya);
b. Melakukan peningkatan pelayanan;
c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu:
    1. Pajak Penghasilan (PPh);
    2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
    4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan (BPHTB);
    6. Pajak Tidak Langsung Lainnya.
d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian;
b. Melakukan urusan keuangan;
c. Melakukan urusan tata usaha; dan
d. Melakukan urusan rumah tangga (kantor).

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan pengamatan potensi perpajakan;
b. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak;

c. Melaksanakan penilaian objek pajak; dan

d. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mengolah data;

b. Menyajikan informasi perpajakan;

c. Merekam dokumen perpajakan;

d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;

e. Melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB;

f. Melaksanakan dukungan teknis komputer;

g. Melakukan pemantapan *e-SPT* dan *e-filling*; dan

h. Menyimpan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

b. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;

c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan dan surat lainnya;

d. Melakukan penyuluhan perpajakan;

e. Melaksanakan peregistrasian wajib pajak; dan

f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP);
b. Melaksanakan pembimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;
c. Melaksanakan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
d. Merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
e. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan prosedur keberatan;
f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
g. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
h. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile*;
i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;
j. Menganalisis kinerja wajib pajak; dan
k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pemeriksaan;
b. Melaksanakan pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan;
c. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah PelaksanaanPemeriksaan Pajak); dan
d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan penagihan aktif
b. Melaksanakan penagihan piutang pajak;
c. Penundaan angsuran tunggakan pajak;
d. Usulan penghapusan piutang pajak; dan
e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Pejabat Fungsional Penilai

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.1.4 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil jawa Barat 1

Tujuan umum dari Kantor Pelayanan Pajak di kanwil jawa Barat 1 adalah memeberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban

perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa barat 1, juga apek-aspek kegiatan yang tidak dapat dilupakan adalah:

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi, serta pemeriksaan kepada wajib pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan mengolah data, maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penuisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB dan PTLL.
5. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah pegawai bagian Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kanwil Jabar I yang secara keseluruhan berjumlah sebanyak 76 orang.Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 76, sedangkan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 62.

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini meliputi usia dan jabatan. Penyebaran kuesioner penelitian ini ditujukan kepada pegawai dalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing kepala seksi setiap kantor untuk dijawab.

4.2.1 Usia Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Distribusi Responden Menurut Usia

No	Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
1	21 - 25 tahun	5	8.06%
2	26 - 30 tahun	19	30.65%
3	31 - 35 tahun	10	16.13%
4	36 - 40 tahun	12	19.35%
5	41 - 45 tahun	7	11.29%
6	46 - 50 tahun	8	12.90%
7	Diatas 50 tahun	1	1.61%
	Total	**62**	**100%**

Berdasarkan usia dapat dilihat bahwa paling banyak responden adalah berusia antara 26-30 tahun, yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 30,65 persen dari total responden. Kemudian sebanyak 12 responden atau sebesar 19,35 persen berusia 36 – 40 tahun. Artinya sebagian besar responden dalam penelitian ini masih berusia kurang atau sama dengan 40 tahun.Hal ini disebabkan karena Pada seksi PDI ini diperlukan Pegawai yang semangat kerjanya tinggi agar pada saat bekerja tidak cepat merasa jenuh (Bambang irianto :2012).

4.2.2 Jabatan Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Distribusi Responden Menurut Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Kepala seksi	10	16,13%
2	Pelaksana	52	83,87%
	Total	**62**	**100%**

Berdasarkan jabatan dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah pelaksana, yaitu sebanyak 52 orang atau sebesar 83,8 persen dari total responden. Sementara kepala seksi ada sebanyak 10 responden atau sebesar 16,13 persen dari 10 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kanwil Jabar I. Hal ini disebabkan karena kepala seksi dan pelaksana dari seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggung jawab atas aplikasi Sistem Informasi Akuntansi di KPP.

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan persentase skor tanggapan responden.Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2009;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor } = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$$

Keterangan:
Skor aktual = jumlah skor jawaban responden
Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden × jumlah pernyataan × 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	Sangat Buruk/Sangat Rendah
2	36.01% – 52.00%	Buruk/Rendah
3	52.01% – 68.00%	Cukup Baik/Sedang
4	68.01% – 84.00%	Baik/Tinggi
5	84.01% – 100%	Sangat Baik/Sangat Tinggi

(Umi Narimawati :2007)

4.3.1 Deskriptif Variabel Partisipasi Pengguna

Partisipasi penggunamenekankan bagaimana peranan user dalam proses perancangan sistem informasi akuntansi dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mendukung dan mengarahkan kontribusinya. Partisipasi penggunapada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Iakan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Partisipasi pengguna diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang partisipasi pengguna pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir

pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Partisipasi Pengguna

Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
Kebutuhan user	210	310	67,74	Cukup baik
Pengetahuan akan kondisi lokal	241	310	77,74	Baik
Keengganan untuk berubah	233	310	75,16	Baik
User merasa terancam	207	310	66,77	Cukup Baik
Meningkatkan alam demokrasi	205	310	66,13	Cukup Baik
TOTAL	**1096**	**1550**	**70,71**	**Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel partisipasi pengguna sebesar 70,71 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi penggunasistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I secara umum berada dalam kategori Baik. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada sebagian besar indikator juga berada pada interval 52 – 68 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Hanya indikator pengetahuan akan kondisi local dan keengganan untuk berubah berada pada interval 68 – 84 yang termasuk dalam kategori baik. Seperti yang ada pada Bab 2 Partisipasi pengguna digunakan untuk menunjukkan intervensi personal yang nyata pemakai dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan sampai tahap implementasi sistem informasi. Adanya partisipasi pengguna diharapkan dapat meningkatkan penerimaan sistem oleh pengguna yaitu dengan mengembangkan harapan yang realitis terhadap

kemampuan sistem, memberikan sarana bargaining dan pemecahan konflik seputar masalah perancanagn sistem, serta memperkecil adanya *resistance to change* dari pemakai terhadap informasi yang dikembangkan (Elfreda Aplonia Lau:2004:28).

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran partisipasi pengguna sistem informasipada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan.Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada variabel partisipasi pengguna sistem informasi.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Variabel Partisipasi Pengguna

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Partisipasi sebagai anggota tim dalam menganalisa kebutuhan sistem informasi di perusahaan	F	6	24	23	6	3	67,74
	%	9,68	38,71	37,10	9,68	4,84	
Memahami keadaan di lingkungan tempat bekerja	F	12	33	15	2	0	77,74
	%	19,35	53,23	24,19	3,23	0,00	
Sistem informasi yang disusun dapat dipergunakan dan sesuai dengan kebutuhan	F	10	29	21	2	0	75,16
	%	16,13	46,77	33,87	3,23	0,00	
Penerapan sistem informasi komputer dalam instansi menjadikan kemampuan tidak sesuai dengan kebutuhan instansi	F	10	16	23	11	2	66,77
	%	16,13	25,81	37,10	17,74	3,23	
Terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan	F	7	17	27	10	1	66,13
	%	11,29	27,42	43,55	16,13	1,61	

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.5 dapat diketahui gambaran masing-masing butir pernyataan pada variabel partisipasi penggunaSistem Informasi Akuntansi padaKantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.6 diatas.

1. Partisipasi Dalam Menganalisa Kebutuhan Sistem

Sebagian besar (37,10%) responden menjawab bahwa partisipasi sebagai anggota tim dalam menganalisa kebutuhan sistem informasi di perusahaan masih belum baik atau cukup. Paling banyak pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Isudahberpartisipasi (38,71%) dalam menganalisa kebutuhan sistem informasi akuntansi di KPP di Kanwil Jawa barat 1. Namun masih banyak juga pengguna sistem informasi yang masih kurang berpartisipasi (9,68%) dalam menganalisa kebutuhan sistem informasi di perusahaan. Sebagian (4,84%) responden menjawab tidak berpartisipasi dalam menganalisa kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi di perusahaan pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1. Persentase skor tanggapan responden sebesar 67,74% maka untuk indikator kebutuhan *user* termasuk dalam kategori cukup baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 32,26%. Gap ini perlu diperhatikan dengan cara sistem tersebut harus bias menyerap kebutuhan *user* , dan yang tahu kebutuhan *user* adalah user sendiri, sehingga partisipasi *user* dalam pengembangan SI akan meningkatkan tingkat keberhasilan meningkatkan partisipasi pengguna terhadap penyesuaian kebutuhan sistem informasi akuntansi. Dan hal ini sama dengan fenomena yang disebutkan pada latar belakang bahwa *user* tidak terlibat langsung dalam perancangan dan pembuatan sistem sehingga *user* tidak tahu jika terjadi ketidaksesusaian Sistem Informasi dengan kodisi pekerjaan mereka (Fredi Ari : 2012).

2. Pemahaman lingkungan kerja

Pada umumnya (53,23%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Isudah memahami keadaan di lingkungan tempat kerja.Namun masih banyak juga (24,19%) pengguna sistem informasi yang masih belum baik atau cukup memahami keadaan di lingkungan tempat kerja.Sebagian (3,23%) responden menjawab kurang memahami lingkungan tempatnya bekerja KPP di Kanwil Jawa Barat 1. Persentase skor tanggapan responden sebesar 77,74%, maka untuk indikator pengetahuan akan kondisi local termasuk dalam kategori baik.Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 22,26%. Gap ini perlu diperhatikan dengan cara meningkatkan pemahaman *user* terhadap lingkungan tempat bekerja.

3. Penggunaan sistem informasi sesuai kebutuhan

Pada umumnya (46,77%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Isependapat bahwa sistem informasi yang disusun dapat dipergunakan dan sesuai dengan kebutuhan.Namun (33,87%) pengguna sistem informasi yang masuk kategori cukup setujubahwa sistem informasi dapat dipergunakan dan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan (3,23%) kurang sepedapat bahwa sistem informasi di DJP sesuai dengan kebutuhan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 75,16%, maka untuk indikator keengganan untuk berubah berada dalam kategori baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 24,84%. Untuk mengurangi keengganan untuk berubah itu dapat dikurangi bila user terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi (Azhar Suanto:2010).

4. Kemampuan tidak sesuai kebutuhan

Sebesar (25,81%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Ikurang sependapat penerapan sistem informasi DJP dalam perusahaan menjadikan kemampuan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun (37,10%)menjawab kategori cukup sependapat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan menjadikan kemampuan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bahkan (16,13%) responden sangat sependapat bahwa penerapan sistem informasi DJP dalam perusahaan menjadikan kemampuan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 66,77% Maka indikator *user* merasa terancam berada pada kategori cukup baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 33,23%.Keterlibatan *user* dalam proses perancangan dan pengembangan SI merupakan salahsatu cara menghindari kondisi yang tidak diharapkan dari dampak penerapan SIA dengan komputer.

5. Keterlibatan dalam mengambil keputusan

Paling banyak (43,55%) pengguna sistem informasi DJP pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Icukup sependapat bahwa user terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan. Sebanyak (16,13%) kurang sependapat bahwa user terlibat langsung dalam mengambil keputusan. Akan tetapi cukup banyak juga (27,42%) yang terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan. Bahkan (1,61%) user tidak sependapat bahwa user terlibat langsung dalam mengambil keputusan.Persentase skor tanggapan responden sebesar 66,13%, maka indikator *user* meningkatkan alam demokrasi berada pada kategori baik.

Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 33,87%. Namun demikian, persentase baiknya masih cukup rendah dan belum mencapai kategori sangat baik. Gap ini perlu diperhatikan dengan cara melibatkan *user* secara langsung dalam proses perancangan SIA ini.

4.3.2 Deskriptif Variabel Kemampuan Teknis Pengguna

Kemampuan teknis penggunasistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Iakan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kemampuan teknis pengguna diukur menggunakan 2 (dua) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang kemampuan teknis pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Pengguna

Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	201	310	64,84	Cukup baik
2	209	310	67,42	Cukup baik
TOTAL	**410**	**620**	**66,13**	**Cukup baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Tabel 4.6 diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kemampuan teknis pengguna sebesar 66,13% berada di antara interval 52 – 68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis

pengguna sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I secara umum masih berada dalam kategori cukup baik.

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran kemampuan teknis pengguna sistem informasi akuntansi pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 2 (dua) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada variabel kemampuan teknis pengguna sistem informasi akuntansi.

Tabel 4.7

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Variabel Partisipasi Pengguna

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Mengikuti pendidikan formal/ non formal (pelatihan) mengenai sistem informasi	F	4	23	23	8	4	64,84
	%	6,45	37,10	37,10	12,90	6,45	
Pengalaman dalam penggunaan Sistem Informasi komputer di perusahaan tempat bekerja	F	3	28	23	5	3	67,42
	%	4,84	45,16	37,10	8,06	4,84	

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.7 dapat diketahui gambaran masing-masing butir pernyataan pada variabel kemampuan teknis pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.8 diatas.

1. Keikutsertaan dalam pendidikan formal/non formal

Banyak (37,10%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I kurang sering mengikuti pendidikan non formal (pelatihan) mengenai sistem informasi. Namun banyak juga (37,10%) yang sering mengikuti pendidikan non formal (pelatihan) mengenai sistem informasi. Sebanyak

(12,90%) responden jarang mengikuti pendidikan non formal (pelatihan) mengenai sistem informasi DJP. Bahkan (6,45%) responden tidak pernah mengikuti pelatihan mengenai Sistem Informasi DJP. Persentase skor tanggapan responden sebesar 64,84% Maka indikator pendidikan formal/ non formal (pelatihan) berada pada kategori cukup baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 35,16%. Gap ini perlu diperhatikan dengan cara *user* harus mengikuti pelatihan agar sistem informasi yang dihasilkan maksimal Seperti halnya dalam fenomena di latar belakang Pelatihan pengunaan Sistem Informasi DJP tidak berkelanjutan, sehingga menghambat perkembangan kemampuan *user*(fredi Ari :2012).

2. Pengalaman dalam penggunaan sistem informasi

Paling banyak (45,16%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah berpengalaman dalam penggunaan Sistem Informasi komputer di perusahaan tempat bekerja. Akan tetapi cukup banyak juga (37,10%) yang kurang berpengalaman dalam penggunaan Sistem Informasi DJP di perusahaan tempat bekerja. Bahkan (4,84%) responden tidak berpengalaman dalam mengoperasikan sistem informasi DJP. Persentase skor tanggapan responden sebesar 67,42%, maka indikator pengalaman user dalam menggunakan Sistem Informasi DJP berada pada kategori cukup baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 32,58%. Jadi, itu berarti dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak perpengalaman dalam penggunaan sistem informasi DJP di Kanwil Jawa Barat 1, dan gap ini perlu diperhatikan dengan cara memperbanyak pengalaman *user* dalam penggunaan sistem informasi akuntansi.

4.3.4 Deskriptif Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Iakan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Sistem informasi akuntansi diukur menggunakan 6 (enam) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Informasi Akuntansi

Indikator	Skor aktual	Skor ideal	% skor aktual	Kriteria
hardwere	207	310	66,77	Cukup baik
softwere	206	310	66,45	Cukup baik
brainwere	209	310	67,42	Cukup baik
prosedur	229	310	73,87	Baik
database	238	310	76,77	Baik
Teknologi jaringan komunikasi	229	310	73,87	Baik
TOTAL	**1318**	**1860**	**70,86**	**Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Tabel 4.8 diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel sistem informasi akuntansi sebesar 70,86% berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Isecara umum berada dalam kategori baik.

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran sistem informasiakuntansi pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 6 (enam) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan.Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada variabel sistem informasi akuntansi.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Kecepatan komputer dalam membaca data dari memori	F	2	28	21	11	0	66,77
	%	3,23	45,16	33,87	17,74	0,00	
Softwere yang dimiliki instansi sudah sesuai dengan kebutuhan	F	2	26	24	10	0	66,45
	%	3,23	41,94	38,71	16,13	0,00	
Mampu mengoperasikan seluruh aplikasi dalam komputer di instansi	F	9	16	26	11	0	67,42
	%	14,52	25,81	41,94	17,74	0,00	
Selalu melakukan kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi	F	12	22	25	3	0	73,87
	%	19,35	35,48	40,32	4,84	0,00	
Data yang dikumpulkan, dimasukan dan diolah mencerminkan keadaan atau data yang sebenarnya	F	11	32	17	2	0	76,77
	%	17,74	51,61	27,42	3,23	0,00	
Internet atau pengolahan data secara on-line diintansi berfungsi dengan sangat baik	F	14	18	27	3	0	73,87
	%	22,58	29,03	43,55	4,84	0,00	

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.9 dapat diketahui gambaran masing-masing butir pernyataan pada variabel sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.9 diatas.

a. Kecepatan komputer membaca data

Paling banyak (45,16%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sependapat komputer yang digunakan sudah cepat dalam membaca data dari memori. Akan tetapi cukup banyak juga (17,74%) yang

merasa komputer yang digunakan kurang cepat dalam membaca data dari memori. Persentase skor tanggapan responden sebesar 66,77% Maka indikator hardwere berada pada kategori cukup baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 33,23%.Jadi, dalam penerapannya masih ada peralatan hardware yang mungkin kurang baik, dan mengalami beberapa masalah. Gap ini harus diperhatikan dengan cara meningkatkan Kecepatan komputer dalam membaca data dari memori. Dan hal ini sama dengan fenomena yang disebutkan pada latar belakang bahwa ketika beban kerja tinggi maka tingkat koneksi lamban atau *"hang"* (Dimas Besmaputra: 2009).

b. Software sesuai kebutuhan

Paling banyak (41,94%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sependapat bila dilihat dari kemampuannya, cara kerjanya dan cara menggunakannya, softwere yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi cukup banyak juga (16,13%) yang merasa softwere yang digunakan masih kurang sesuai dengan kebutuhan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 66,45%, maka indikator software berada pada kategori cukup baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 33,55%. Jadi, dalam penerapan Sistem informasi akuntansi masih mengalami beberapa masalah khususnya masalah software. Gap ini perlu diperhatikan dengan cara menyesuaikan software sesuai dengan kebutuhan *user*.

c. Kemampuan mengoperasikan seluruh aplikasi

Banyak (38,71%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I cukup mampu mengoperasikan seluruh aplikasi dalam

komputer di instansi. Akan tetapi cukup banyak juga (41,94%) yang sudah mampu mengoperasikan seluruh aplikasi dalam komputer. Sebanyak (17,74%) kurang mampu untuk mengoperasikan seluruh aplikasi dalam komputer. Persentase skor tanggapan responden sebesar 67,42% maka untuk indikator brainware termasuk dalam kategori cukup baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 32,58%. seperti kita ketahui bahwa brainware adalah salah satu komponen yang penting dalam keberhasilan penerapan Sistem informasi akuntansi, jadi secanggih apapun sistem yang dibuat atau dirancang kalau pengguna/brainware tidak dapat mengimbangi akan menjadi percuma saja. Dan hal ini sama dengan fenomena yang disebutkan pada latar belakang bahwa ditjen pajak memiliki kelemahan pada SDM (Djazoeli Sadhani:2005).

d. Melakukan kegiatan berdasarkan informasi

Paling banyak (40,32%) pengguna sistem informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I cukup sependapat dalam melakukan kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi. Akan tetapi ada juga (4,84%) yang tidak melakukan kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi. Maka indikator prsoedur masuk kedalam kategori baik. Persentase skor tanggapan responden sebesar 73,87%, maka untuk indikator prosedur termasuk dalam kategori baik.Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 26,13%. Ini mengindikasikan bahwa dalam penerapannya masih ada prosedur yang kurang baik atau terlalu rumit dan juga masih ada beberapa aktivitas yang kurang sesuai

dengan prosedur dan fungsinya.Gap ini perlu diperhatikan dengan user melakukan aktivitas yang sesuai dengan prosedur dan fungsinya.

e. Data yang masuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya

Paling banyak (51,61%) pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sependapat data yang dikumpulkan, dimasukan dan diolah mencerminkan keadaan atau data yang sebenarnya. Akan tetapi ada juga (3,32%) yang kurang sependapat dengan hal tersebut. Persentase skor tanggapan responden sebesar 76,77% maka indikator database masuk ke dalam kategori baik.Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 23,23%.Ini mengindikasikan bahwa dalam penerapannya masih terdapat beberapa masalah dalam penerapan database yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I. dan gap ini perlu diperhatikan dengan cara data-data penunggak pajak langsung terupdate agar*user* dalam memasukan data yang mencerminkan data yang sebenarnya.Ini sesuai dengan fenomena bahwa sistem data-data penunggak pajak tidak langsung *update*(markus mekeng : 2010).

f. Internet dan pengolahan data secara online

Paling banyak (43,55%) pengguna sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I cukup sependapat internet atau pengolahan data secara on-line di instansi sudah berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi ada juga (4,84%) yang kurang sependapat dengan hal tersebut. Persentase skor tanggapan responden sebesar 73,87% maka indikator teknologi jaringan komunikasi masuk kedalam kategori baik. Tetapi masih dibawah skor ideal(100%) dan ditemukan gap 26,13%. Gap ini perlu diperhatikan dengan cara

sistem informasi DJP agar langsung terhubung dengan bank tempat pembayaran pajak. Ini berarti sesuai dengan fenomena bahwa masih terdapat beberapa masalah terutama masalah integrasi pencatatan online dengan bank (markus mekeng:2010)

4.4 Analisis Verifikatif

4.4.1 Keterkaitan partisipasi pengguna dengan Kemampuan Teknik pengguna

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regressi diuji dan dianalisa lebih lanjut, ada beberapa asumsi yang harus diuji guna mengetahui apakah kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normlitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ketiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut harus diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu.

a. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

Normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi dan berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut.

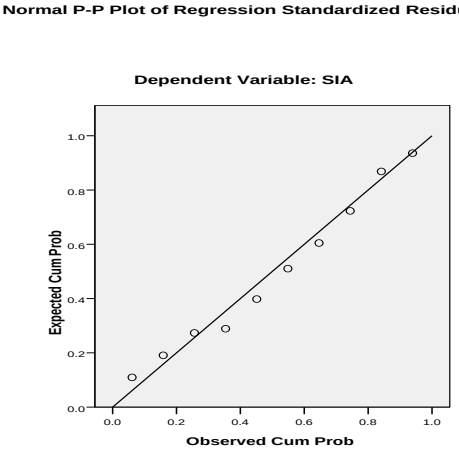
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters [a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24331982
Most Extreme Differences	Absolute	.136
	Positive	.136
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.430
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada tabel 4.10 dapat dilihat nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,993. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1 Grafik normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana titik-titik nilai residual masing-masing perusahaan

menyebar disekitar garis diagonal.Karena model regresi berdistribusi normal maka pengujian dapat dilanjutkan.

b. Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari variabel bebas ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.11 berikut dapat dilihat nilai signifikansi koefisien korelasi variabel bebas dengan nilai absolut residual (error).

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	Partisipasi	Correlation Coefficient	.152
		Sig. (2-tailed)	.676
		N	10
	Kemampuan	Correlation Coefficient	-.018
		Sig. (2-tailed)	.960
		N	10

Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.11 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas dengan nilai absolut error (0,676 dan 0,960) masih lebih besar dari 0,05.

c. Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi.Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Partisipasi	.858	1.166
	Kemampuan	.858	1.166

a. Dependent Variable: SIA

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.11 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas yaitu partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna, karena nilai VIF dari partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas tersebut.

2. Etimasi Persamaan Regressi

Pada bagian ini akan diestimasi koefisien regressi pengaruh partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna terhadap sistem informasi akuntansi menggunakan regressi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regressi berdasarkan data hasil konversi skor hasil tanggapan responden. Bentuk model persamaan regressi yang akan diestimasi adalah

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon}$$

Dimana:
Y = Sistem informasi akuntansi
X_1 = Partisipasi pengguna
X_2 = Kemampuan teknis pengguna
b_0 = konstanta
bi = koefisien regressi variabel Xi
ε = Pengaruh faktor lain

Model regressi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada sistem informasi akuntansi yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna). Berdasarkan hasil pengolahan data partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna terhadap sistem informasi akuntansi di peroleh hasil regressi sebagai berikut.

Tabel 4.13
Koefisien Regressi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.631	1.298		-2.028	.082
	Partisipasi	1.141	.432	.485	2.642	.033
	Kemampuan	.574	.179	.589	3.212	.015

a. Dependent Variable: SIA

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.13 maka dapat dibentuk model prediksi variabel partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna terhadap total sistem informasi akuntansi sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 2{,}631 + 1{,}141\ X_1 + 0{,}574\ X_2$$

Berdasarkan persamaan prediksi diatas, maka dapat diinterpretasikan koefisien regressi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

a. Koefisien partisipasi pengguna sebesar 1,141 menunjukkan bahwa setiap peningkatan partisipasi pengguna sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan sistem informasi akuntansi sebesar 1,141 satuan dengan asumsi kemampuan teknis pengguna tidak berubah.
b. Koefisien kemampuan teknis penggunasebesar 0,574 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kemampuan teknis pengguna sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan sistem informasi akuntansi sebesar 0,574 satuan dengan asumsi partisipasi penggunatidak berubah.
c. Nilai konstanta sebesar -2,631 menunjukan nilai prediksi rata-rata penurunan sistem informasi akuntansi apabila partisipasi pengguna dankemampuan teknis penggunasama dengan nol.

Korelasi Partisipasi Pengguna Dengan Sistem Informasi Akuntansi Ketika Kemampuan Teknis Pengguna Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara partisipasi pengguna dengan sistem informasi akuntansi ketika kemampuan teknis pengguna tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Koefisien Korelasi Parsial Partisipasi pengguna Dengan Sistem informasi akuntansi

Correlations

Control Variables			SIA	Partisipasi
Kemampuan	SIA	Correlation	1.000	.707
		Significance (2-tailed)	.	.033
		df	0	7
	Partisipasi	Correlation	.707	1.000
		Significance (2-tailed)	.033	.
		df	7	0

Hubungan antara partisipasi pengguna dengan sistem informasi akuntansi ketika kemampuan teknis pengguna tidak berubah adalah sebesar 0,707 dengan arah positif. Artinya partisipasi pengguna memiliki hubungan yang kuat dengan sistem informasi akuntansi ketika kemampuan teknis pengguna tidak mengalami perubahan. Arah positif menunjukkan bahwa ketika partisipasi pengguna semakin tinggi, sementara kemampuan teknis pengguna tidak berubah maka sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I akan semakin baik. Kemudian besar pengaruh partisipasi pengguna terhadap sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I ketika kemampuan teknis pengguna tidak berubah adalah $(0,707)^2 \times 100\% = 50,0\%$.

Korelasi Kemampuan Teknis Pengguna Dengan Sistem Informasi Akuntansi Ketika Partisipasi Pengguna Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara kemampuan teknis pengguna dengan sistem informasi akuntansi ketika partisipasi pengguna tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Koefisien Korelasi Parsial kemampuan teknis pengguna dengan sistem informasi akuntansi

Correlations

Control Variables			SIA	Kemampuan
Partisipasi	SIA	Correlation	1.000	.772
		Significance (2-tailed)	.	.015
		df	0	7
	Kemampuan	Correlation	.772	1.000
		Significance (2-tailed)	.015	.
		df	7	0

Hubungan antara kemampuan teknis pengguna dengan sistem informasi akuntansi ketika partisipasi pengguna tidak berubah adalah sebesar 0,772 dengan arah positif. Artinya kemampuan teknis pengguna memiliki hubungan yang kuat dengan sistem informasi akuntansi ketika partisipasi pengguna tidak mengalami perubahan. Arah positif menunjukkan bahwa ketika kemampuan teknis pengguna semakin baik, sementara partisipasi pengguna tidak berubah maka sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I akan semakin baik. Kemudian besar pengaruh kemampuan teknis pengguna terhadap sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I ketika partisipasi pengguna tidak berubah adalah $(0,772)^2 \times 100\% = 59,6\%$.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap sistem informasi akuntansi dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, kemampuan teknis pengguna memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap sistem informasi akuntansi dibandingkan partisipasi pengguna.

4.4.2 Pengaruh Partisipasi Pengguna Terhadap Sistem Informasi Akuntansi

Dugaan sementara partisipasi pengguna berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho.$\beta_{\square} = 0$: Partisipasi pengguna tidak berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansipada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Ha.$\beta_{\square} \neq 0$: Partisipasi pengguna berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Berdasarkan keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai koefisien regresi dari variabel partisipasi pengguna terhadap sistem informasi akuntansi sebesar 1,141 (β_1 = 1,141). Karena nilai koefisien regresi lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa partisipasi pengguna secara parsial berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Secara parsial partisipasi pengguna memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 50,0% terhadap sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I ketika kemampuan teknis pengguna tidak berubah. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa partisipasi pengguna berpengaruh terhadap Sitem Informasi Akuntansi (Rajiv Sabherwal :2006).

Secara parsial partisipasi pengguna berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi. *User* tidak terlibat langsung dalam perancangan dan pengembangan Sistem informasi yang ada di KPP, sistem yang dibuat terkadang

tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai atau kondisi kerja yang ada di lapangan. Alangkah baiknya jika dalam proses perancangan atau penyempurnaan Sistem Informasi Akuntansi *user* dilibatkan atau ikut berpartisipasi dalam proses tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keterlibatan pengguna atau partisipasi pengguna sangatlah penting, karena penggunalah yang mengetahui kondisi lokal pekerjaannya dan penggunalah yang mengetahui apakah sistem yang di buat sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya atau tidak.

Kesimpulannya adalah semakin besar *user* berpartisipasi dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi maka akan membuat sistem informasi akuntansi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I menjadi lebih baik.

4.4.3 Pengaruh Kemampuan Teknis Pengguna Terhadap Sistem Informasi Akuntansi

Dugaan sementara kemampuan teknis pengguna berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho.$\beta_2 = 0$: Kemampuan teknisberpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Ha.$\beta_2 \neq 0$: Kemampuan teknis pengguna berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Berdasarkan keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai koefisien regresi dari variabel kemampuan teknis pengguna

terhadap sistem informasi akuntansi sebesar 0,574 (β_2 = 0,574). Karena nilai koefisien regresi lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa kemampuan teknis pengguna secara parsial berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Secara parsial kemampuan teknis pengguna memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 59,6% terhadap sistem informasi akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I ketika partisipasi pengguna tidak berubah. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa kemampuan teknis pengguna adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Sistem Informasi Akuntansi (Raid Moh'd Al-adaileh :2009).

Secara parsial kemampuan teknis pengguna berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. Fenomena yang terjadi pada sistem informasinya adalah kurangnya keikutsertaan pengguna sistem informasi dalam pelatihan penggunaan sistem informasi akuntansi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu pengguna sistem harus mengikuti pelatihan agar sistem informasi yang dihasilkan maksimal.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi kemampuan teknis pengguna maka akan membuat sistem informasi akuntansi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I menjadi lebih baik.

4.4.4 Pengaruh Partisipasi Pengguna dan Kemampuan Teknis Pengguna Secara Bersama-sama Terhadap Sistem Informasi Akuntansi

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pada

permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna terhadap sistem informasi akuntansi diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.

Tabel 4.16
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893[a]	.798	.740	.27590

a. Predictors: (Constant), Kemampuan, Partisipasi
b. Dependent Variable: SIA

Nilai R (0,893) pada tabel 4.16 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel bebas (partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna) secara simultan dengan sistem informasi akuntansi. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Sistem Informasi Akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Kemudian nilai R-Square sebesar 0,798 atau 79,8 persen, menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari partisipasi pengguna dan kemampuan teknis penggunasecara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada sistem informasi akuntansi sebesar 79,8 persen. Artinya secara bersama-sama variabel bebas (partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 79,8% terhadap perubahan sistem informasi akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 20,2%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel bebas yang diteliti seperti ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi

pengembangan sistem informasi, keberadaan dewan pengarah sistem informasi (Putu Astri :2010).

b. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji apakah pengaruh partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna terhadap sistem informasi akuntansi, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial (individual) maka dilakukan pengujian hipotesis. Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau menggunakan sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regresi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol.

Pada pengujian secara parsial apabila nilai koefisien regresi variabel yang sedang diuji tidak sama dengan dari nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi variabel yang sedang diuji sama dengan nol maka Ho diterima. Pada pengujian simultan apabila ada nilai koefisien regresi variabel independen tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien regresi sama dengan nol, maka Ho diterima.

Pengujian secara bersama-sama bertujuan untuk membuktikan apakah partisipasi pengguna dan kemampuan teknis penggunasecara bersama-sama berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Semua $\beta i = 0$
$i = 1,2$

Partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Ha : Ada $\beta i \neq 0$ i = 1,2	Partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna secara bersama-sama berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Dari hasil pengolahan dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari kedua variabel bebas lebih besar dari nol. Karena koefisien regresi dari kedua variabel bebas lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna secara bersama-sama berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Secara bersama-sama partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 79,8% terhadap perubahan Sistem Informasi Akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Partisipasi pengguna dan kemampuan teknis pengguna secara bersama-sama mempengaruhi sistem informasi akuntansi Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Sebagian besar pengguna sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I kurang berpartisipasi dalam menganalisa kebutuhan sistem informasi di perusahaan, sebaiknya dalam proses perancangan atau penyempurnaan sistem informasi akuntansi pegawai atau pengguna sistem informasi tersebut dilibatkan dalam proses tersebut, dan diadakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pengguna atau meningkatkan SDM nya sendiri pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

Maka dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya partisipasi pengguna sistem informasi serta meningkatnya kemampuan teknis pengguna sistem

informasi akan membuat sistem informasi akuntansi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I menjadi lebih baik.